

## Penerapan Prinsip-Prinsip *Value for Money* dalam Sistem Tata Kelola Keuangan Desa

Ridofi aidan Hartoyo <sup>1\*</sup>, Gigih Aulia Hilmiawan <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Jalan Ringroad Barat, Dowangan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

*Corresponding Email:* [gigihhilmiawan@unu-jogja.ac.id](mailto:gigihhilmiawan@unu-jogja.ac.id) <sup>1\*</sup>

### Histori Artikel:

*Dikirim* 6 Agustus 2025; *Diterima dalam bentuk revisi* 15 September 2025; *Diterima* 20 Oktober 2025; *Diterbitkan* 1 Desember 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

### Suggested citation:

Hartoyo, R. aidan, & Hilmiawan, G. A. (2025). Penerapan Prinsip-Prinsip Value for Money dalam Sistem Tata Kelola Keuangan Desa. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5634-5644. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.5264>.

### Abstrak

Pemerintah desa sebagai pemilik hak otonomi daerah tetap menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa kinerja organisasi sektor publik memberikan hasil yang nyata, transparan, dan sesuai harapan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip Value for Money (VfM) dalam tata kelola keuangan di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan perangkat desa. Analisis data dilakukan melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding model Strauss dan Corbin, untuk mengidentifikasi tema-tema inti dalam tata kelola keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip VfM melalui optimalisasi sumber daya, pemanfaatan aset desa, peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes, dan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan prioritas. Terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi meliputi keterbatasan fleksibilitas perubahan anggaran akibat regulasi, perubahan kebijakan pusat, fluktuasi harga material, dan faktor cuaca yang mempengaruhi realisasi program. Akan tetapi, Desa Panggunharjo telah mampu beradaptasi dengan cepat melalui perencanaan yang baik didukung oleh partisipasi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan Desa Panggunharjo telah transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip VfM, serta perlu peningkatan pada antisipasi risiko dan adaptasi terhadap perubahan eksternal.

**Kata Kunci:** Value for Money; Tata Kelola Keuangan Desa; Transparansi; Efisiensi; Efektivitas.

### Abstract

Village governments as owners of regional autonomy rights still face challenges in ensuring that the performance of public sector organizations provides real, transparent results, and in accordance with community expectations. The purpose of this research is to analyze the application of Value for Money (VfM) principles in financial governance in Panggunharjo Village, Sewon Sub-district, Bantul Regency, including aspects of economy, efficiency, and effectiveness. This research uses a qualitative method. Data was collected through direct observation and in-depth interviews with village officials. Data analysis was conducted through the stages of open coding, axial coding, and selective coding using the Strauss and Corbin model to identify core themes in village financial management. The results of the study indicate the application of the VfM principle through the optimization of resources, utilization of village assets, increasing village revenue through BUMDes, and budget planning based on priority needs. There are still several obstacles to be faced, including limited flexibility in budget changes due to regulations, changes in central government policy, fluctuations in material prices, and weather factors that affect program implementation. However, Panggunharjo Village has been able to adapt quickly through good planning supported by community participation. Thus, it can be concluded that Panggunharjo Village's financial governance is transparent, accountable, and in accordance with VfM principles, and needs improvement in risk anticipation and adaptation to external changes.

**Keyword:** Value for Money; Village Financial Management; Transparency; Efficiency; Effectiveness.

## 1. Pendahuluan

Dengan adanya hak otonomi bagi pemerintah daerah, kinerja dari organisasi sektor publik mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Adanya rasa penasaran dari masyarakat membuat mereka bertanya-tanya mengenai hasil apa saja yang diperoleh mereka dari kinerja yang dilakukan oleh organisasi sektor publik, termasuk instansi pemerintah daerah. Timbulnya pemikiran masyarakat mengenai organisasi sektor publik hanya sebuah tempat pemborosan anggaran menyebabkan fenomena bagi organisasi agar lebih memperhatikan Value for Money yang berfokus pada input, output, dan outcome pada pengelolaan mereka (Wuwungan *et al.*, 2019). Berbagai lembaga publik seperti pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan akuntabilitas publik dan menghasilkan keuangan yang kuat bagi daerah mereka, dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengatasi kebocoran dana, menghilangkan pemborosan, serta mengidentifikasi beberapa program yang tidak berkelanjutan secara finansial (Wandasari & Daulay, 2023). Pengukuran kinerja adalah hal yang krusial dan sangat penting bagi organisasi sektor publik. Pada lingkup yang lebih luas, pengukuran kinerja keuangan tidak hanya terbatas pada unsur laba dan rugi, tetapi juga mencakup efisiensi serta efektifitas penggunaan sumber daya (Panjaitan *et al.*, 2024). Dalam sistem pengendalian di suatu instansi, pengukuran kinerja merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengelola dan mengevaluasi program kegiatan yang telah terlaksana, kemudian dibandingkan dengan rancangan-rancangan yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan (Kojo *et al.*, 2019). Pengukuran kinerja sangat penting diterapkan sebab sejak lahirnya penerapan penganggaran yang berbasis kinerja, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kinerja keuangannya sehingga dapat menghasilkan suatu kinerja keuangan yang baik (Sampow & Pangkey, 2022).

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah desa merupakan lembaga yang secara teknis memiliki wewenang untuk menjalankan program kegiatan di desa. Akan tetapi, pemerintah desa seringkali dihadapkan dengan tantangan dalam mengelola kegiatan-kegiatan tersebut. Tantangan yang dimaksud adalah harus memenuhi target kinerja yang telah ditentukan dan pastinya dapat dipertanggung jawabkan (Kristiana, 2024). Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan manfaat bagi masyarakat, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Disebutkan dalam ayat seterusnya bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud diwujudkan dalam APBD. Munculnya kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana dalam APBN ke APBD setiap tahun untuk membantu pembiayaan desa dinilai menjadi strategi yang efektif, dengan ini pemerintah menginginkan desa yang ada di seluruh Indonesia agar dapat memajukan wilayahnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya (Kristiana, 2024). Fenomena yang muncul di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam mengelola dana desa agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Terdapat beberapa kendala teknis yang masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa Panggunharjo akibat regulasi dan faktor eksternal seperti fluktuasi harga dan kondisi cuaca. Kondisi ini dapat menurunkan efektivitas pembangunan dan berpotensi memengaruhi alokasi dana di tahun berikutnya. Desa diberikan kewenangan dan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, yang disebut sebagai dana desa. Dana desa diberikan setiap tahun kepada setiap desa, yang diharapkan dapat memajukan perekonomian desa, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperbaiki kemiskinan, serta memunculkan berbagai inovasi guna mencapai kesejahteraan bersama (Maharini, 2019). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maharini (2019) berfokus pada perencanaan dalam pengelolaan anggaran di Desa Banguntapan berdasarkan dana desa tahun 2018. Penelitian ini mengamati bagaimana dana desa dikelola berdasarkan tahapan perencanaan anggaran, termasuk proses pengalokasian dan pemanfaatannya bagi desa. Sementara itu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu menganalisis tata kelola keuangan desa secara menyeluruh sesuai prinsip-prinsip value for money. Penelitian ini juga membahas implementasi dan evaluasi pengelolaan keuangan desa untuk memastikan bahwa dana desa dikelola secara efektif dan

## RESEARCH ARTICLE

akuntabel. Penelitian yang menggunakan metode value for money sebagai konsep analisisnya juga dilakukan oleh Candy *et al.* (2024) yang menganalisis pengelolaan anggaran belanja daerah di Kota Pontianak dan Sari *et al.* (2022) yang berfokus kepada kontribusi anggaran dinas terhadap pelayanan di Kota Pekanbaru. Kedua penelitian tersebut memiliki objek yang sama yaitu di kota atau pemerintahan daerah, sedangkan penelitian ini mengambil objek yang ada di pemerintahan desa. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri & Susliyanti (2019) menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Jambidan menggunakan pendekatan value for money dengan dasar laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tujuan utama penelitian tersebut mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan desa dalam mencapai prinsip value for money berdasarkan data keuangan Desa Jambidan. Penelitian yang akan dikerjakan memiliki perbedaan dalam ruang lingkupnya, tidak hanya berpusat pada kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan desa melalui aspek laporan APBDes, akan tetapi meluas pada penilaian tata kelola keuangan desa secara menyeluruh.

Urgensi dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana anggaran di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dengan menggunakan pendekatan Value for Money. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, agar masyarakat lebih mudah memahami bagaimana dana desa digunakan, dan dapat membantu mencapai tujuan secara maksimal (Ngakil & Kaukab, 2020). Selain itu, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu desa lain untuk mengelola keuangan desa dengan lebih baik, sehingga dapat membantu meningkatkan tata kelola keuangan di desa secara umum. Novelty yang ada pada penelitian ini terletak pada penerapan konsep value for money untuk menilai kinerja tata kelola keuangan di desa, yaitu Desa Panggungharjo. Meskipun metode value for money sudah umum digunakan pada organisasi sektor, akan tetapi implementasi yang terjadi di desa masih minim ditemukan. Penelitian ini memberikan pandangan yang lebih luas mengenai bagaimana tata kelola keuangan dan anggaran desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan dampak yang nyata serta efektif bagi masyarakat. Penelitian ini menggali lebih dalam terkait dengan dampak serta tantangan penerapan prinsip-prinsip Vfm dalam konteks tata kelola keuangan desa. Maka dari itu, peneliti berupaya dalam mencari temuan-temuan yang akurat serta aktual, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai model yang mampu memberikan kontribusi guna mengembangkan tata kelola keuangan di desa lain. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran berbasis bukti aktual guna menghasilkan temuan baru dalam menilai tata kelola maupun kebijakan di desa. Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana dampak yang diberikan dengan penerapan prinsip-prinsip value for money terhadap penilaian anggaran serta tata kelola keuangan di Desa Panggungharjo, termasuk kebijakan yang ada dalam konteks pemerintahan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip Vfm pada perencanaan serta pengelolaan keuangan di Desa Panggungharjo.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Tata Kelola Keuangan Desa

Pemahaman terkait pengelolaan dana desa menjadi komponen penting yang wajib dimiliki oleh para perangkat desa, dalam merealisasikan transparansi dan akuntabilitas desa (Zahro *et al.*, 2023). Dana desa merupakan yang dilakukan oleh pemerintah desa guna mencapai target pembangunannya dengan secepat mungkin, yang dikelola secara mandiri untuk mencukupi kebutuhan masyarakat (Goo & Sanda, 2022). Terdapat tiga prinsip utama yang menjadi dasar bagi tata kelola daerah. Pertama, prinsip transparansi. Prinsip transparansi memiliki arti bahwa masyarakat mendapat hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena hal ini bersangkutan dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat, terlebih guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak (Novitasari & Iswara, 2023). Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri merupakan prinsip mengenai tanggung jawab organisasi kepada proses suatu anggaran mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan harus dilaporkan secara

benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat (Kawatu *et al.*, 2024). Masyarakat berhak untuk mengetahui serta meminta pertanggungjawaban atas rancangan maupun penggunaan dari anggaran tersebut. Ketiga, prinsip value for money. Konsep ini memiliki arti bahwa adanya penerapan dari tiga pokok dasar value for money dalam proses penganggaran antara lain, ekonomis, efisiensi, dan efektif (Cunha *et al.*, 2023). Dari segi fungsional, keberhasilan konsep tata kelola dapat dilihat dari apakah pemerintah telah menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dalam untuk mencapai target yang telah ditentukan, atau sebaliknya pemerintah tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan (Ngakil & Kaukab, 2020).

## 2.2 Penilaian Kinerja

Kinerja merupakan suatu alat yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam terpenuhinya rencana dan tujuan suatu organisasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan yang diharapkan, serta seberapa jauh kemampuan suatu organisasi dalam mengelola sumber dayanya (Kurniati *et al.*, 2024). Penilaian kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi. Keberhasilan dalam organisasi sektor sendiri dapat digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Publik akan menilai keberhasilan suatu organisasi sektor melalui kesanggupan mereka dalam memberikan pelayanan yang terjangkau serta berkualitas (Yulitiawati & Rusmidarti, 2021). Pada umumnya, jika kinerja masing-masing individu mendapat penghargaan, hal ini memungkinkan kinerja tersebut untuk diberi penghargaan yang sesuai, maka dari itu, hal tersebut dapat memicu besarnya usaha dari tiap individu untuk memberikan kinerja yang baik (Mulyaningtyas, 2018).

## 2.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bastian (2010) menerangkan bahwa kinerja merupakan suatu alat yang digunakan sebagai atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan. Indikator kinerja penting digunakan untuk mengetahui apakah suatu program telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk membantu pemerintah dalam membuat, serta mengalokasikan sumber daya guna mewujudkan akuntabilitas (Putri & Susliyanti, 2019). Pengelolaan daerah secara efisien dan efektif harus dilakukan dengan kinerja yang maksimal dan optimal, sebab hal tersebut berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah. Pengelolaan daerah terdiri dari beberapa tahapan dalam menciptakan program kerja di suatu daerah. Pengelolaan tersebut tertuang dalam nilai atau besaran yang tergambar dengan angka yang dimulai dari tahap penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap daerah (Yusmina & Siswantoro, 2023).

## 2.4 Value for Money

Value for money menurut Mardiasmo (2009) suatu konsep pengelolaan organisasi sektor yang berfokus pada tiga prinsip, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi: perolehan masukan dengan kualitas atau jumlah tertentu pada harga terendah. Efisiensi: pencapaian hasil yang maksimal dengan penggunaan input seminim mungkin guna mencapai output yang ditentukan. Efisiensi merupakan perbandingan dari hasil dan masukan berdasarkan standar kinerja atau target yang telah ditentukan. Efektivitas: keberhasilan program sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas perbandingan dari outcome dengan output (Yulitiawati & Rusmidarti, 2021). Dalam konteks organisasi sektor seperti instansi pemerintahan, tiga elemen utama dalam konsep value for money dapat dikembangkan sebagai berikut. Ekonomis, perolehan sumber daya tertentu dengan harga terendah. Prinsip ini menilai sejauh mana suatu instansi dapat meminimalisir sumber daya dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif, dengan menghemat anggaran serta tidak melakukan pemborosan dalam pelaksanaan program (Mahmudi, 2016). Efisiensi menurut Bastian (2006), merupakan hubungan antara masukan dan keluaran barang atau jasa digunakan untuk mencapai output tertentu. Efisiensi adalah hubungan antara barang atau jasa yang diperoleh melalui suatu aktivitas dengan penggunaan sumber daya tertentu. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dapat dikatakan efisien jika mampu menghasilkan output tertentu dengan input terendah, atau dapat menghasilkan output sebesar mungkin (spending well) dengan input tertentu (Mardiasmo, 2009). Efektivitas merupakan hubungan

## RESEARCH ARTICLE

antara hasil dan tujuan, efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh output, kebijakan, serta prosedur organisasi dapat mencapai tujuan mereka. Mahmudi (2016) mengungkapkan bahwa efektivitas adalah perbandingan dari hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah terealisasi. Jika ekonomi berorientasi pada input, efisiensi pada output serta proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil).

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Berdasarkan Sugiyono (2020), metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu objek dalam kondisi alamiah yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, berbeda dengan pendekatan eksperimen. Peneliti memiliki peran sebagai kunci dalam penelitian ini, dan pengumpulan data dilakukan guna menemukan data yang akurat dalam menganalisa prinsip VfM di tata kelola keuangan desa (Subroto & Ruscitarsi, 2022). Penelitian kualitatif merupakan suatu konsep untuk mengumpulkan data dengan mempertimbangkan kerangka ilmiah. Proses penelitian dilakukan secara objektif, sehingga hasil penelitian yang diperoleh bersifat ilmiah juga dapat dipertanggungjawabkan (Kurniati *et al.*, 2024). Jenis penelitian kualitatif menyajikan data secara apa adanya tanpa manipulasi, untuk memberikan gambaran yang lengkap terkait suatu kejadian dan dimaksudkan untuk memberi klarifikasi atas fenomena yang terjadi (Miles *et al.*, 2014). Penelitian ini berfokus untuk menganalisis kondisi serta fenomena yang terjadi pada Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Peneilintian dilakukan untuk memberikan gambaran yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta, agar dapat memberi pemahaman terkait tata kelola keuangan berdasarkan pendekatan value for money di Desa Panggungharjo.

#### 3.1 Metode Pengumpulan Data

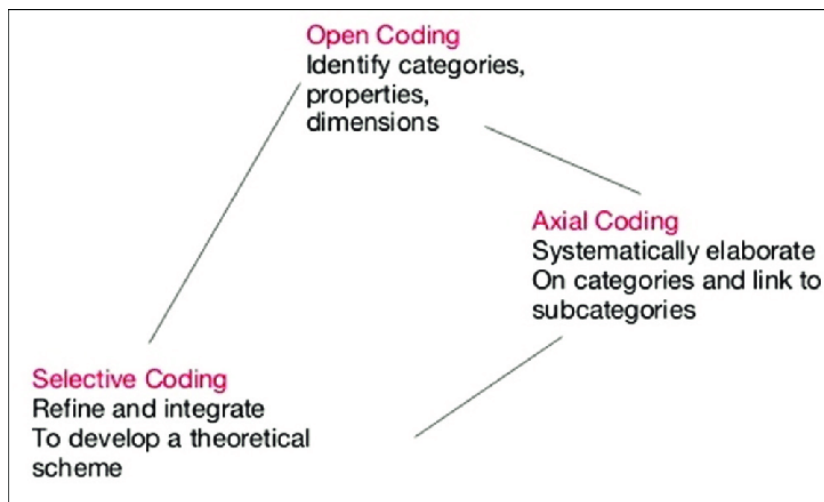
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara, merupakan suatu pengumpulan data melalui proses komunikasi dan bertatap muka secara langsung dengan narasumber, baik individu maupun kelompok (Trilaksono & Handayani, 2020). Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait data yang akan digunakan dalam penelitian dengan cara tanya jawab atau mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber (Liando *et al.*, 2014). Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data yang meneliti dokumen, arsip, maupun catatan yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dilakukan secara langsung dengan tujuan untuk memperoleh data guna menunjang penelitian (Kojo *et al.*, 2019). Sedangkan observasi adalah salah satu pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena atau kejadian tertentu secara langsung pada penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh data secara tepat dan akurat (Goo & Sanda, 2022). Catatan lapangan atau memo bisa juga menggabungkan dengan ketiganya (Penulis & Pratiwi, 2024).

#### 3.2 Teknik Analisis Data

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa di Indonesia yang dikenal memiliki sistem tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Berbagai program dan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dengan memanfaatkan dana desa, namun efektivitas penggunaan anggaran masih menjadi perhatian utama. Meski Desa Panggungharjo telah mendapatkan berbagai penghargaan atas transparansi dan akuntabilitasnya, masih perlu diteliti lebih dalam apakah prinsip Value for Money benar-benar diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Aspek fenomena yang dapat diteliti di Desa Panggungharjo antara lain, BUMDes, program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta digitalisasi dan transparansi keuangan. BUMDes di Desa Panggungharjo telah berkembang dengan berbagai unit usaha, seperti pengelolaan limbah dan usaha kuliner yang masih perlu dianalisis terkait bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes, apakah sudah efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Desa Panggungharjo memiliki program bantuan sosial yang berasal dari APBDes, dengan adanya penelitian ini dapat melihat apakah dana bantuan tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Desa ini telah menggunakan teknologi dalam transparansi

RESEARCH ARTICLE

anggaran melalui website desa dan forum musyawarah. Hal ini dapat diteliti lebih mendalam, apakah inovasi ini benar-benar meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis data oleh Strauss dan Corbin, yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu pengkodean terbuka, pengkodean berporos, dan pengkodean terpilih. Kegiatan analisis dalam penelitian dilakukan dalam bentuk pengkodean (coding). Pengkodean merupakan proses penguraian data, pengonsepan, dan penyusunan kembali dengan cara baru (Strauss & Corbin, 1990). Pengkodean digunakan dalam penelitian ini untuk beberapa tujuan antara lain: penyusunan teori sebagai landasan, memberikan keakurasian pada proses penelitian, meminimalisir bias dan asumsi yang kurang tepat, memberikan kepadatan makna, serta mengembangkan keterampilan untuk menghasilkan teori (Williams & Moser, 2019). Proses perbandingan secara terus-menerus (the constant comparative method of analysis), dan pengajuan pertanyaan merupakan standar analisis dasar yang digunakan dalam proses pengkodean (Adibah, 2018).



Gambar 1. Analisis Data Coding dalam Penelitian Kualitatif

**3.3 Open Coding**

Proses open coding merupakan proses awal dari analisis data, peneliti melakukan pengelompokan kategori dan mengurai gejala yang didapatkan melalui pengamatan mendalam maupun dalam teks hasil wawancara (Seidel & Urquhart, 2013). Langkah awal dalam pengkodean terbuka Adalah pelabelan fenomena, disini peneliti melakukan pemberian nama terhadap objek, kejadian, atau informasi yang ditemukan pada saat wawancara. Pelabelan sendiri merupakan pembuatan nama dari setiap fenomena tertentu yang ditemukan, juga dapat dikatakan sebagai kegiatan konseptualisasi data. Pelabelan dilakukan dengan cara membandingkan insiden-insiden, sampai dapat diberikan nama yang sama untuk fenomena-fenomena yang serupa (Adibah, 2018).

**3.4 Axial Coding**

Pengkodean berporos merupakan seperangkat prosedur untuk menempatkan kembali data awal dengan pembaruan, serta membuat kaitan antar kategori. Pengkodean ini diawali dari penentuan jenis kategori yang dilanjutkan dengan penemuan hubungan antar kategori atau antarsubkategori (Arbrar, 2024). Tahap ini menghubungkan kategori-kategori dalam bentuk susunan (sifat-sifat) yang dilakukan dengan menghubungkan bermacam kode, serta menjadi kombinasi cara berfikir induktif dan deduktif (Strauss & Corbin, 1990). Pengodean berporos dapat menjadi pemandu dalam tahap selanjutnya, untuk membangun teori, atau mengembangkan temuan dalam penelitian kualitatif secara mendalam. Kerangka konseptual yang dihasilkan dapat menjadi landasan guna memahami fenomena yang diteliti (Penulis & Priari, 2023).

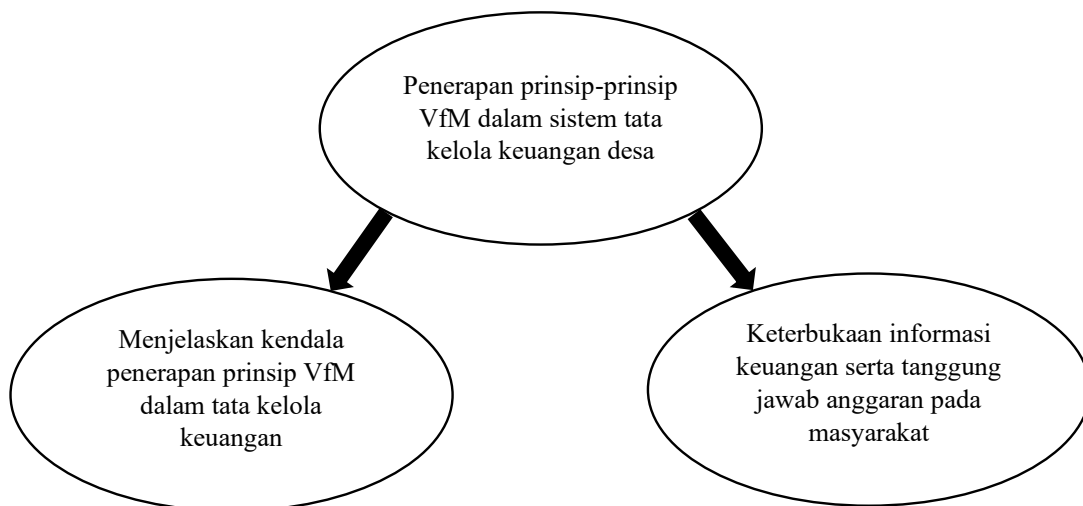
### 3.5 Selective Coding

Langkah selanjutnya pengkodean terpilih, yaitu pemilihan kategori inti yang memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan kategori data yang lebih terorganisir dari pengkodean berporos. Tahap ini memungkinkan penyelesaian data lebih lanjut untuk memilih kategori tematik utama, yang kemudian menyelaraskan tema utama ke kategori lain secara sistematis (Williams & Moser, 2019). Pengkodean terpilih dilakukan setelah variabel inti ditemukan. Variabel ini mendeskripsikan bagaimana peneliti menyelesaikan fokus utama mereka (Karuntu *et al.*, 2022). Proses ini dapat menghasilkan kategori inti yang menjadi penemuan pokok dari riset yang dilakukan dengan menyesuaikan data.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil

Terdapat tiga tema dari tiga kode inti yang menjadi elemen dasar dari prinsip value for money, yang berkaitan dengan implementasi value for money pada tata kelola keuangan di desa panggungharjo. Melalui proses pengkodean terbuka hingga tahap pengkodean terpilih, peneliti menemukan hasil dari dampak serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip value for money. Temuan yang diperoleh antara lain, penerapan prinsip-prinsip VfM dalam sistem tata kelola keuangan desa, menjelaskan kendala penerapan prinsip VfM dalam tata kelola keuangan, keterbukaan informasi keuangan serta tanggung jawab anggaran pada masyarakat. Temuan-temuan tersebut didapatkan dengan analisis mendalam melalui sesi wawancara dengan empat narasumber penting yang berkaitan langsung dengan tata kelola keuangan desa, guna mendapatkan hasil yang akurat dan relevan bagi penelitian. Ketiga kode tersebut saling berkaitan dan memberi gambaran mengenai alur dalam menemukan hasil penelitian, menggunakan metode analisis data coding oleh Strauss and Corbin.



Gambar 2. Kategori Inti Penelitian

### 4.2 Pembahasan

Penerapan prinsip-prinsip *Value for Money* dalam sistem tata kelola keuangan desa merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan dana desa yang efisien, efektif, dan ekonomis. Prinsip ekonomis diterapkan dengan mengelola anggaran desa secara bijak agar tidak terjadi pemborosan atau pengeluaran yang tidak produktif. Desa Panggungharjo menjadi contoh sukses penerapan prinsip ini melalui sistem keuangan terpusat dalam satu rekening, standarisasi harga wajar, dan penggunaan sistem digital seperti Siskeudes untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan. Sistem

## RESEARCH ARTICLE

sentralisasi anggaran memungkinkan pengelolaan yang lebih transparan dan terkontrol, sebagaimana diungkapkan informan: “Semua dana masuk ke rekening kas desa...” (informan 1), “Semua dana yang masuk dikelola jadi satu di rekening kas desa...” (informan 2), “[...] keluar-masuk dana tetap satu pintu di bendahara.” (informan 1), “[...] uang hanya bisa dicairkan lewat bendahara.” (informan 3). Penggunaan aplikasi Siskeudes juga memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan program yang telah direncanakan, seperti dijelaskan: “Pengelolaan keuangannya... sudah lewat aplikasi Siskeudes...” (informan 1), “Semua pengelolaan... melalui sistem Siskeudes...” (informan 2), “[...] seluruh proses perencanaan dan pelaporan keuangan desa sudah terintegrasi dalam aplikasi Siskeudes.” (informan 3), “[...] penganggaran diinput ke sistem sesuai dana tahunan.” (informan 4), “Semisal ada kegiatan dananya tidak mencukupi... ada notif kegiatan tersebut tidak bisa didanai...” (informan 1).

Sistem pelaporan keuangan Desa Panggungharjo telah mengikuti siklus tahunan yang terstruktur dan berbasis prosedur tetap, sebagaimana diungkapkan: “Penetapan APBKal... maksimal 31 Desember, kalau telat kita ada penalti pengurangan ADD...” (informan 1), “RAB juga itu harus selesai di sekitar akhir tahun, kalau lewat dari akhir tahun itu biasanya ada sanksinya.” (informan 3), “[...] rencana kerja di awal tahun, laporan realisasi di akhir tahun termasuk laporan semester.” (informan 1), “[...] musyawarah akhir tahun untuk pelaporan, terus di awal tahun untuk perencanaan.” (informan 2). Strategi antisipasi pemborosan dan penyelewengan dana diterapkan dengan memastikan pencairan dana hanya dilakukan jika telah dianggarkan dalam APBKal dan didukung dokumen pertanggungjawaban seperti SPJ dan bukti transaksi, sebagaimana dijelaskan: “[...] cuma bisa dikeluarkan apabila sudah dianggarkan di APBKal.” (informan 1), “[...] hanya bisa digunakan jika sudah diinput di dalam APBKal.” (informan 2), “[...] jika belum dianggarkan dana tadi tidak bisa dicairkan...” (informan 3), “[...] pencairan setelah syarat SPJ terpenuhi.” (informan 1), “[...] harus ada bukti transaksi dulu baru bisa dicairkan.” (informan 2), “[...] harus memberikan bukti transaksi...” (informan 3). Mekanisme pengawasan juga melibatkan kontrol internal dan eksternal, seperti pengawasan pemerintah pusat serta standarisasi harga dari kabupaten. Hal ini diungkapkan oleh informan: “Kegiatan pembangunan diawasi oleh tim BPKP di lapangan.” (informan 2), “[...] anggaran pembangunan diawasi inspektorat dari pusat.” (informan 3), “Untuk belanja besar, kita ada tim sendiri yang cek ke penjual...” (informan 4), “[...] harga barang atau jasa, kita juga punya standarisasi harganya dari kabupaten.” (informan 1), “[...] desa ikut standar harga yang diberikan kabupaten.” (informan 2), “[...] pengadaan barang dan jasa... kita dapat standarisasi harga dari kabupaten.” (informan 4). Desa Panggungharjo juga mengoptimalkan sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan desa, seperti menyewakan aset desa dan mengelola BUMDes, sebagaimana dijelaskan: “[...] kita sesuaikan nilai tanahnya rata-rata dengan berjalannya waktu... otomatis PAD nya juga ikut meningkat.” (informan 1), “[...] bangunan atau aset desa kita sewakan.” (informan 2), “[...] gunakan aset seperti gedung... terus disewakan.” (informan 3), “[...] ada BUMDes... bisa turut meningkatkan pendapatan desa.” (informan 1), “[...] punya BUMDes yang bisa menghasilkan pemasukan tambahan.” (informan 2), “[...] dari penyewaan aset, pendapatan bagi hasil BUMDes...” (informan 4).

Proses perencanaan program desa dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dengan masyarakat, berorientasi pada visi dan misi kepala desa, serta disesuaikan dengan kebutuhan prioritas warga, sebagaimana diungkapkan: “[...] kami itu pelaksana ketugasan lurah, diturunkan lewat Kasi/Kaur lalu dimusyawarahkan.” (informan 2), “[...] program dan perencanaan ada dalam visi & misi lurah.” (informan 3), “[...] rancangan kerja ikuti program lurah, dibagi ke Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan.” (informan 4), “[...] jika ada kebutuhan prioritas atau mendesak, itu kita sesuaikan.” (informan 1), “[...] buat skala prioritasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.” (informan 2), “[...] peningkatan kualitas masyarakat, pembangunan infrastruktur, layanan.” (informan 1), “Program dirancang untuk meningkatkan kualitas desa dan masyarakat.” (informan 3), “[...] perlu disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan masyarakat.” (informan 4). Efektivitas pengelolaan keuangan desa diukur tidak hanya dari serapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas hidup, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan sosial-ekonomi. Hal ini dijelaskan oleh informan: “[...] berdampak itu lebih tepatnya ke nilai, dibuktikan dengan penyerapan dana.” (informan 2), “[...] penyerapan <20% berarti program tidak jalan, >50% berjalan tapi kurang bagus diatas itu terlaksana dengan baik.” (informan 3), “[...] penyerapan <60% = program kurang baik, >60% = cukup baik.” (informan

## RESEARCH ARTICLE

4), "Dampak kegiatan pembangunan desa tidak cuma fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat..." (informan 1), "Indeks keberhasilan atau kemajuan desa itu diukur ketika desa itu selalu meningkat." (informan 2), "[...] indikator keberhasilan dilihat dari kemampuan melaksanakan program." (informan 3), "[...] berhasilnya program tidak hanya dari angka, tapi manfaat bagi masyarakat." (informan 4). Meskipun tata kelola telah disusun secara sistematis, Desa Panggungharjo tetap menghadapi kendala seperti perubahan harga pasar, kebijakan pusat, hingga pandemi Covid-19. Hal ini diungkapkan oleh informan: "[...] kendala biasanya ya lebih ke kebijakan." (informan 1), "[...] perubahan APBD hanya bisa sekali, kecuali ada kebijakan nasional." (informan 2), "[...] kebijakan pemerintah pusat berubah seperti pajak." (informan 3), "[...] bantuan BKK bisa dikembalikan jika gagal dua kali." (informan 1), "[...] BKK harus dikembalikan jika gagal dua tahun berturut-turut." (informan 2), "[...] dana tahun depan diturunkan kalau serapan rendah..." (informan 4), "[...] harga semen dan pasir naik turun." (informan 1), "[...] harga material berubah, harus menyesuaikan." (informan 3), "[...] perubahan harga pasar tidak bisa diprediksi." (informan 4). Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan secara daring, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, dan kemudahan akses informasi keuangan, seperti dijelaskan: "[...] kalau dari masyarakat, mereka bikin proposal, lalu kita bantu ajukan ke kabupaten." (informan 1), "[...] masyarakat juga kita ajak untuk musyawarah dalam penggunaan dana tersebut, tapi tetap yang membelanjakan lewat desa." (informan 2), "[...] saat kita mengadakan musyawarah juga mengundang perwakilan dari warga." (informan 3), "[...] seperti dana sisa (silpa)... dirapatkan lagi dengan warga." (informan 4), "[...] ada beberapa yang minta datanya di Kantor Kelurahan, biasanya difoto atau diprint dibawa pulang." (informan 1), "Program pembangunan harus menyertakan infografis secara rinci." (informan 2), "[...] bisa dilihat di laporan APBDes... di Website Kelurahan Panggungharjo." (informan 3), "[...] di website sudah tercantum semua laporan keuangan yang ada setiap tahunnya." (informan 4).

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian mengenai Penilaian Tata Kelola Keuangan Desa Menggunakan Prinsip-Prinsip *Value for Money* menunjukkan bahwa Desa Panggungharjo telah berhasil menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Prinsip ekonomis diwujudkan melalui sistem keuangan terpusat dalam satu rekening, digitalisasi pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes, serta mekanisme pelaporan berbasis prosedur tahunan yang terstruktur. Desa juga menerapkan kontrol ketat terhadap pencairan dana, sehingga mampu mengantisipasi pemborosan dan penyelewengan. Prinsip efisien terlihat dari upaya desa mengoptimalkan aset lokal dan pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Prinsip efektif tercermin dalam perencanaan program yang berbasis kebutuhan prioritas masyarakat serta pengukuran kinerja yang menggabungkan realisasi anggaran dan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga. Meskipun terdapat kendala eksternal seperti fluktuasi harga pasar dan perubahan kebijakan nasional, Desa Panggungharjo mampu menghadapinya secara adaptif melalui forum musyawarah dan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas juga ditunjukkan melalui keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat, baik secara daring maupun melalui musyawarah, serta pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, tata kelola keuangan Desa Panggungharjo mencerminkan praktik pengelolaan yang baik, partisipatif, dan bertanggung jawab. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada data yang dicantumkan penulis serta metodologi yang digunakan. Pengukuran indikator *Value for Money* umumnya lebih optimal jika menggunakan perhitungan rasio keuangan untuk mendapatkan data ekonomis, efisien, dan efektif secara lebih konkrit dibandingkan hanya menggunakan data wawancara. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada prinsip-prinsip *Value for Money* tanpa menyertakan metode perhitungan rasionya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas pemahaman terkait penerapan prinsip *Value for Money* dalam konteks desa. Penelitian

## RESEARCH ARTICLE

komparatif dengan desa-desa lain yang memiliki karakteristik berbeda dapat dilakukan untuk mendapatkan model praktik terbaik di tingkat daerah. Hal ini akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang penerapan prinsip *Value for Money* dalam tata kelola keuangan desa.

## 6. Referensi

- Adibah, I. Z. (2018). Metodologi grounded theory. *Jurnal Inspirasi*, 2(2), 147–166.
- Arbrar, A. H. (2024). Dampak pendekatan kualitatif dalam penelitian pemasaran dan evaluasi terhadap kinerja bisnis. *Jurnal of Digital Business*, 1(1), 41–50.
- Armereo, C. (2021). Analisis good corporate governance pada pengelolaan keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. *Journal Ekombis Review*, 9(2), 241–254.
- Astuti, A. B., Anggraini, O., & Kusumawiranti, R. (2022). Implementasi pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. *Populika*, 10(1), 63–77. <https://doi.org/10.37631/populika.v10i1.336>.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi ketiga)*. Erlangga.
- Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. [https://doi.org/10.36563/jamanta\\_unita.v1i1.421](https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421).
- Bili, M., Yohanes, S., & Lamataro, C. W. T. (2024). Penggunaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(04), 1–12. <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i04.4379>.
- Candy, G. T., Heniwati, E., Kurniawan, R., Ekonomi, F., & Tanjungpura, U. (2024). Analisis value for money terhadap anggaran belanja daerah di Kota Pontianak. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 917–922.
- Cunha, A. A. Da, Herdi, H., & Aurelia, P. N. (2023). Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode value for money pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 86–100. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1195>.
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting Unipa*, 1(1), 20–34.
- Hasyim, M. (2021). Prinsip otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 95–106. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4665>.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa. *JRAK*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>.

## RESEARCH ARTICLE

Hilmiawan, G. A., & Prariwi, N. (2023). Biaya dan manfaat pada penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 117–131.

Hilmiawan, G. A., & Pratiwi, N. (2024). Implementasi akuntansi lingkungan dalam perspektif ekonomi sirkular untuk pengelolaan sampah di Kalurahan Panggungharjo: Studi pengelolaan sampah di KUPAS Panggungharjo. *Jurnal Akuntansi (JA)*, 12(1), 35–45.

Javidi, N., Ghanei, M., Ahmadi, K., Ahmadizadeh, M. J., & Ebadi, A. (2021). Introducing the new model of healthy thinking based on human soul faculties: Application in psychotherapy approaches in clinical psychology. *International Archives of Health Sciences*, 8(1), 1. [https://doi.org/10.4103/iahs.iahs\\_141\\_20](https://doi.org/10.4103/iahs.iahs_141_20).